

TANTANGAN EKONOMI PRESIDEN BARU

Oleh Tim Riset Majalah Stabilitas LPPPI

(Hasil riset ini telah dimuat dalam Majalah Stabilitas LPPPI)

Presiden terpilih hasil pemilu 17 April 2019 dan pemerintahan yang dibentuknya dihadapkan pada satu tantangan besar mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Pertumbuhan di atas 5 persen ini wajib dipenuhi guna mencapai target ekonomi yang diwacanakan baik pasangan calon presiden 01 maupun 02. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa dibutuhkan pertumbuhan 5 persen ke atas? Jawabannya adalah pertama untuk memetik bonus demografi, kedua menciptakan lapangan kerja yang luas dan ketiga terus mengurangi angka kemiskinan. Ketiga maksud tersebut secara tidak langsung menjadi agenda para capres, baik 01 maupun 02.

Pemerintahan baru yang dibentuk oleh presiden, memiliki tantangan yang tidak ringan. Terutama terkait keharusan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini mandeg di level 5 persen.

Salah satu instrumen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah investasi yang besar pula. Berdasarkan perhitungan Tim Riset Stabilitas, apabila pada 2019 ditargetkan pertumbuhan 7 persen, dengan angka ICOR sama dengan 2018 sebesar 6,3 maka, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp1.153,4 triliun atau tumbuh 33,49 persen dibandingkan tahun 2018.

Tabel 1. Skenario Pertumbuhan

Keterangan	2018	2019 (6 %)	2019 (7 %)
PDB (TriliunRp)	10.425,3	11.050,8	11.155
Delta PDB (TriliunRp)		625,5	729,7
ICOR	6,30	6,30	6,30
PMTB (Triliun Rp)	3.444,1	3.940,7	4.597,5
Delta Investasi (TriliunRp)	215,3	496,66	1.153,45
PertumbuhanInvestasi(%)*	6.67	14.42	33.49

*) Dibandingkan tahun 2018.

Sumber : Tim Riset Stabilitas

Tantangan

Namun demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi 5 persen menghadapi banyak tantangan. Beragam tantangan tersebut meliputi ICOR (*Incremental Capital OutputRatio*) yang masih tinggi, *saving investment gap*, suku bunga tinggi dan FDI tidak optimal, kalah dengan Vietnam misalnya. Pada tahun

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)

Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

2016, berdasarkan laporan dari *World Development Indicators 2016*, angka ICOR Indonesia berada pada angka 5,5. Sedangkan negara di

kawasan ASEAN lebih rendah dari itu semisal Malaysia (4,6), Filipina (3,7), Thailand (4,5), Vietnam (5,2), India (4,9) dan Turki (3,9).

Angka ICOR 5,5 berarti bahwa untuk menghasilkan *output* 1 unit barang, dibutuhkan investasi sebesar 5,5 unit satuan uang, dalam hal ini rupiah. Apabila dibandingkan dengan negara lain, angka ICOR Indonesia masih lebih tinggi. Di Malaysia misalnya, untuk mendapatkan pertumbuhan 1 unit barang, hanya dibutuhkan investasi sebesar 4,6 unit uang (ringgit Malaysia).

Angka ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan investasi masih belum efisien. Inefisiensi investasi ini disebabkan oleh masih tingginya korupsi di Indonesia, koordinasi kebijakan investasi di pusat dengan implementasi di daerah yang tidak optimal dan minimnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi. Terkait dengan minimnya infrastruktur, bisa dilihat adanya rencana pembangunan 14 kawasan industri yang hingga saat ini belum berkembang secara signifikan.

Salah satu hal yang menjadi kendala adalah ketersediaan infrastruktur dasar pengembangan kawasan industri seperti jalan raya, energi, air dan listrik. Lebih lanjut, baru satu kawasan industri yang mulai berkembang yakni kawasan industri Sei Mangkei di Sumatera Utara. Salah satu *tenant* yang berkembang pesat di kawasan industri tersebut adalah pabrik pengolahan kelapa sawit.

Gambar 1. ICOR Indonesia dan Negara Kawasan (2016)



Sumber: *World Development Indicators (2016)*

Tantangan kedua adalah *saving investment gap*. *Saving investment gap* menunjukkan bahwa kebutuhan investasi dalam perekonomian Indonesia tidak bisa dipenuhi dengan ketersediaan tabungan dalam negeri. Alhasil *foreign direct investment* menjadi pilihan yang tidak bisa dipungkiri. Pada periode 2010-2018, Indonesia mengalami *saving investment gap* pada 2012 hingga 2018. Pada 2010, besaran investasi (PMTB) di Indonesia sebesar Rp. 2.128 triliun, di sisi lain *saving* domestik sebesar Rp. 2.246 triliun atau terdapat kelebihan tabungan sebesar Rp 118 triliun.

Memasuki tahun 2012, terdapat *gap* antara tabungan dan investasi sebesar Rp63 triliun, dimana tabungan sebesar Rp. 2.756 triliun dan investasi sebesar Rp. 2.819 triliun. Pada tahun 2018, *gap*-nya semakin melebar menjadi Rp191 triliun dimana investasi total pada 2018 sebesar Rp. 4.791, sedangkan porsi tabungan Rp. 4.600.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>
Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :
Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)
Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id
Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

Gambar 2. Saving-Investment Gap Indonesia 2010-2018 (Triliun Rp)



Note : Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers.
Sumber : Badan Pusat Statistik, World Bank, diolah.

Adanya *saving investment gap* tersebut berimbas kepada tingginya *loan to deposit ratio* Indonesia. Per 2015 hingga Februari 2019, LDR perbankan di Indonesia berkisar antara 89,21 persen hingga 94,78 persen. Posisi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar 94,78. Angka ini telah melebihi ketentuan 92 persen. Angka LDR yang tinggi bisa dipastikan mengganggu likuiditas domestik. Alhasil, suku bunga akan susah untuk turun, terlebih menuju angka *single digit*.

Gambar 3. Loan to Deposito Ratio Indonesia 2015 – Februari 2019



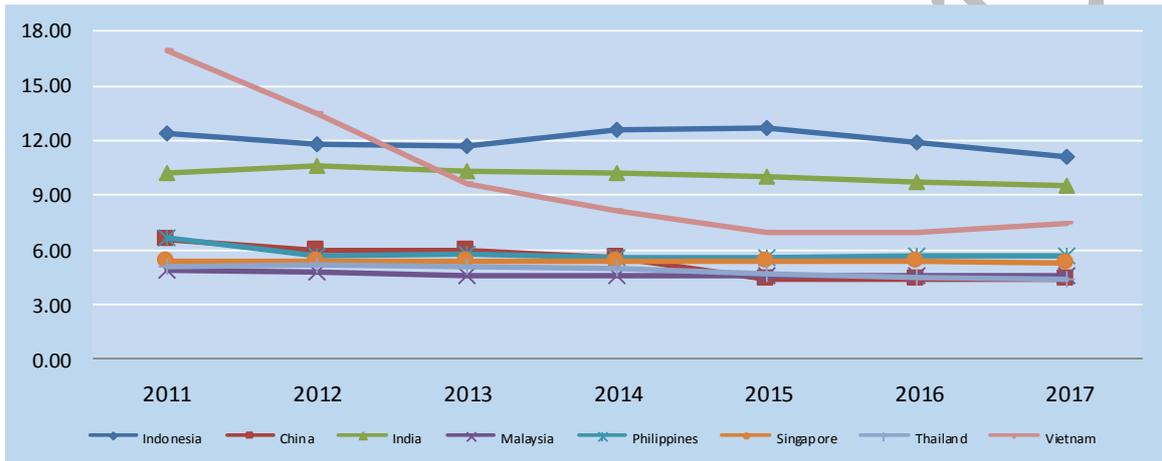
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2019, www.ojk.go.id

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>
Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :
Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)
Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id
Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

Tantangan *ketiga* yang menjadi pengganjal laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu tingkat suku bunga kredit yang tinggi. Bahkan, tingkat suku bunga kredit Indonesia termasuk yang tertinggi dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN dan *peer emerging countries*. Mengacu pada data IMF (2019), suku bunga kredit perbankan Indonesia masih berada pada level *double digit* yaitu 11,07 persen per 2017, tertinggi dibandingkan India (9,51 persen), China (4,35 persen), Malaysia (4,61 persen), Vietnam (7,40), Thailand (4,42 persen), Singapura (5,28 persen), dan Filipina (5,63 persen). Dengan suku bunga kredit yang tinggi menyebabkan tekanan terhadap daya saing sektor riil di Indonesia.

Gambar 4. Komparasi Suku Bunga Pinjaman antar Negara



Sumber: IMF, 2019

Tantangan *keempat* ialah menjadikan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Hingga tahun 2018, kontribusi investasi (PMTB) terhadap PDB sebesar 32 persen dengan laju pertumbuhan investasi sebesar 6,67 persen. Maka guna meningkatkan peranan investasi terhadap PDB maka perlu upaya keras dalam memacu realisasi investasi langsung baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA).

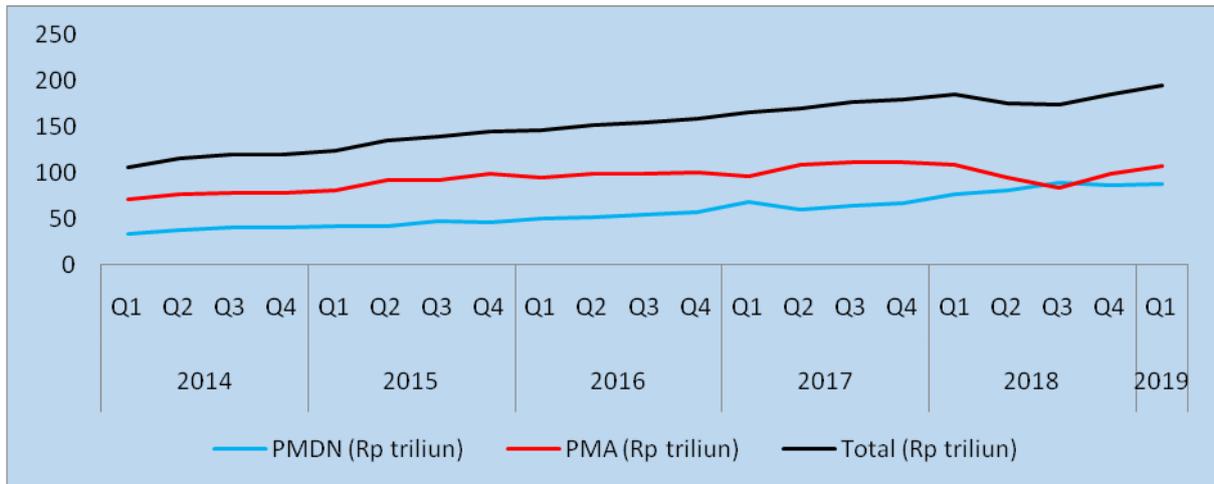
Dalam catatan BKPM (2019), realisasi total investasi per Triwulan I – 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,29 persen dari Rp185,3 triliun (Q1-2018) menjadi Rp195,1 triliun (Q1-2019), didukung dengan realisasi PMDN mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,14 persen. Sedangkan realisasi PMA masih mencatatkan penurunan sebesar -0,92 persen, melanjutkan tren penurunan realisasi PMA sepanjang tahun 2018 (yoy) sebesar -9,8 persen.

Pada hal, pada tiga tahun sebelumnya, realisasi PMA selalu tumbuh positif yaitu 2015 (19,22 persen), 2016 (8,33 persen), dan 2017 (8,58 persen). Di tengah tren pelemahan ekonomi global dan eskalasi politik dalam negeri, pemerintahan terpilih harus bergegas mengembalikan kepercayaan investor asing sehingga realisasi PMA dapat menjadi tambahan energi pendongkrak pertumbuhan ekonomi.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>
 Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :
 Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)
 Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id
 Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

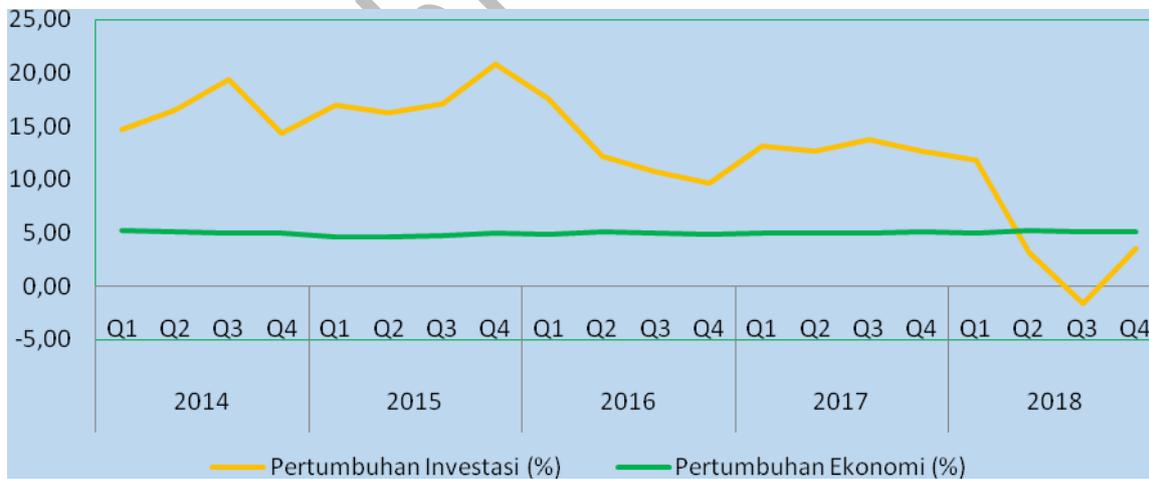
Gambar 5. Perkembangan Realisasi Investasi Q1 2014- Q1 2019 (Rp triliun)



Sumber : BKPM, 2019

Tertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5 persen tidak lepas dari kinerja pertumbuhan investasi langsung yang mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2014-2018, investasi langsung mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan pertama 2018 sebesar 20,76 persen, lalu pada triwulan berikutnya terus mengalami tren penurunan hingga menyentuh level terendah sebesar -1,59 persen pada triwulan ketiga 2018. Dengan melihat tren penurunan pertumbuhan investasi langsung tersebut, maka mengembalikan kinerja positif investasi langsung betul-betul pekerjaan besar pemerintahan mendatang.

Gambar 6. Pertumbuhan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi 2014-2018 (%)



Sumber : BKPM dan BPS, 2018

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>
 Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :
 Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)
 Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id
 Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

Agenda Utama

Di samping menjaga daya beli rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi, pemerintahan mendatang memiliki agenda utama dalam mengakselerasi perbaikan kinerja investasi. Peran strategis investasi bukan hanya terkait kontribusinya mengangkat pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih penting lagi yaitu pengaruhnya terhadap pembukaan lapangan kerja, penurunan pengangguran dan instrumen efektif dalam mereduksi kemiskinan dan ketimpangan.

Agenda pertama bagi pemerintahan baru yaitu mendesain kebijakan yang konsisten dalam menarik minat investasi asing. Problem mendasar yang menyebabkan investor asing semakin surut menanamkan modalnya di Indonesia antara lain korupsi, inefisiensi birokrasi, dan inkonsistensi kebijakan. Saat ini porsi investasi asing (PMA) terhadap PDB Indonesia masih sangat minim yaitu hanya 1,7 persen per 2018, lebih kecil dibandingkan Vietnam (7 persen), Thailand (2,9 persen), Filipina (2,9 persen), dan Malaysia (2,4 persen). Artinya, Indonesia harus berjuang ekstra keras menarik investasi asing karena negara-negara di kawasan ASEAN pun secara agresif melakukan perbaikan kebijakan dan infrastruktur di negaranya masing-masing.

Agenda kedua yaitu melanjutkan upaya menarik dana-dana milik WNI yang diparkir di luar negeri. Program *tax amnesty* yang telah berlangsung pada tahun 2016-2017 menghasilkan deklarasi harta sebanyak Rp4.884,2 triliun, yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp3.700,8 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1.036,7 triliun, dan harta repatriasi aset Rp146,7 triliun. Persoalannya, repatriasi aset WNI di luar negeri hanya 14 persen saja dari total deklarasi harta luar negeri.

Belum lagi pada akhir tahun 2019 tepat 3 tahun pasca program *tax amnesty*, dana repatriasi yang berjumlah Rp146,7 triliun tersebut sudah bisa dibawa kembali ke luar negeri. Pemerintah perlu segera meramu kebijakan yang bisa menarik minat WNI menanamkan dananya di dalam negeri, terutama diarahkan untuk investasi langsung.

Untuk menciptakan daya tarik investasi di Indonesia, pemerintah harus lebih dahulu memperbaiki iklim investasi yang kondusif. Tidak cukup hanya dengan pembangunan aneka infrastruktur, hal utama yang dibutuhkan oleh para pengusaha adalah kepastian investasi. Artinya, regulasi atau kebijakan investasi memang harus didesain dalam *frame* jangka panjang sehingga konsistensi kebijakan menjadi syarat utama yang dapat melindungi kepentingan investor.

Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah juga memiliki instrumen strategis yang dapat menstimulus minat investasi di Indonesia. Melalui kebijakan pajak, pemerintah patut mengkaji dan mempertimbangkan penyesuaian tarif pajak bagi badan usaha. Tarif pajak masih menjadi salah satu faktor penarik investasi. Selain itu, melalui instrumen belanja, pemerintah dapat mengalokasikan belanja yang lebih produktif dalam rangka menurunkan biaya-biaya yang membebani investasi di Indonesia seperti biaya logistik, biaya energi, dan biaya peningkatan kapasitas SDM.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)

Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.